

RANCANGAN AKTUALISASI

Optimalisasi Basis Data per Masa Persidangan untuk Proses Penyusunan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI

Disusun Oleh:

Nama : Maria Juli Insani Simbolon

NIP : 199207292025062002

Unit Kerja : BPP TVR Parlemen

Jabatan : Pengendali Konten Internet

PELATIHAN DASAR CPNS GOLONGAN III ANGKATAN XX

SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

TAHUN 2025

LEMBARAN PERSETUJUAN
RANCANGAN AKTUALISASI

Optimalisasi Database Per Masa Persidangan untuk Memudahkan Pembuatan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja

Nama	**: Maria Juli Insani Simbolon**
NIP	**: 199207292025062002**
Unit Kerja	**: BPP TVR Parlemen**
Jabatan	**: Pengendali Konten Internet**

Telah disetujui untuk diseminarkan Rancangan Aktualisasi pada

09/10/ 2025

Mengetahui,	**Menyetujui,**
Coach	**Mentor**
Indra Cakra Buana, S.A.P, M. Si	**Citra Ananda, S.I.Kom**
NIP. 199010032018011002	**NIP. 198710152018012001**

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia- Nya, saya dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI ini dengan baik. Saya juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. Ir. Indra Iskandar, M.Si., M.I.Kom, selaku Sekretarias Jenderal DPR RI.
2. Ibu Suprihartini, S.IP., M.Si. selaku Deputi Bidang Persidangan.
3. Bapak Dr. Indra Pahlevi, S.IP., M.Si., selaku Kepala Biro Pemberitaan Parlemen.
4. Bapak Ibnurkhalid, S.Pd., selaku Kepala Bagian Media Cetak dan Media Sosial.
5. Bapak Wiryawan Narendro Putro, S.Sos., M.A., selaku Kepala Subbagian Media Sosial.
6. Bapak Zoel Arief Iskandar, S.I.Kom, M.A,selaku Kepala Subbagian Analisis Media.
7. Bapak Mochamad Meinuzur Widhi Nugroho, S.A.P selaku Kepala Subbagian Program dan Produksi Televisi.
8. Pusat Pengembangan Kompetensi SDM Legislatif Sekretariat Jenderal DPR RI, yang telah menyelenggarakan kegiatan ini.
9. Bapak Indra Cakra Buana, S.A.P., M.Si., selaku pembimbing, yang telah memberikan arahan dan bimbingan sehingga rancangan aktualisasi ini dapat diselesaikan dengan baik.
10. Mba Citra Ananda, S.I.Kom, selaku mentor, yang telah meluangkan waktu untuk membimbing, memberi arahan, dan masukan berharga selama penyusunan rancangan aktualisasi ini.
11. Mba Rina Yuli Arti, selaku penulis naskah dokumenter TVR Parlemen yang sudah meluangkan waktu membimbing, memberi arahan dan masukan berharga.
12. Seluruh rekan-rekan Latsar Angkatan XX , rekan-rekan CPNS formasi Pengendali Konten Internet, sahabat dan semua pihak yang terlibat dalam penyusunan rancangan aktualisasi, yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Saya menyadari bahwa rancangan aktualisasi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun Semoga rancangan aktualisasi ini dapat memberikan manfaat dan menjadi kontribusi positif bagi pengembangan kompetensi dan kinerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI.

Jakarta, 9 Oktober 2025



Maria Juli Insani Simbolon
NIP. 199207292025062002

DAFTAR ISI

RANCANGAN AKTUALISASI ..... **i**
LEMBARAN PERSETUJUAN ..... **ii**
KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR TABEL ..... **vi**
DAFTAR GAMBAR ..... **vii**
PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Hukum 2
C. Tujuan 3
a. Tujuan Umum 3
b. Tujuan Khusus 3
D. Manfaat 3
a. Bagi Peserta 3
b. Bagi Instansi (Setjen DPR RI) dan TVR Parlemen 3
c. Bagi Masyarakat/Pemangku Kepentingan 4
BAB II **5**
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN **5**
A. Visi dan Misi Organisasi 5
B. Struktur Unit Kerja 6
C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta 7
BAB III **10**
PENETAPAN ISU PRIORITAS **10**
A. Identifikasi Isu 10
a. Rumusan Isu 10
b. Deskripsi Isu 13
B. Penetapan Isu Prioritas 23
b.Pemilihan Isu Prioritas 24
C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu Prioritas 26
D. Gagasan Pemecahan Isu 28
BAB IV **32**
RANCANGAN AKTUALISASI **32**

A. MATRIX RANCANGAN AKTUALISASI.....32
B. Stakeholder 35
C.Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala 36
D.Analisis Dampak.....36
E. Jadwal Rencana Kegiatan 38
BAB V 39
PENUTUP.....39
A.KESIMPULAN.....39
B. SARAN 39

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Rumusan Isu……9

Tabel 3.2 Tolak Ukur *Urgency*……21

Tabel 3.3 Tolak Ukur *Seriousness*……...…22

Tabel 3.4 Tolak Ukur *Growth*……..22

Tabel 3.5 Pemilihan Isu Berdasarkan *USG*……..24

Tabel 3.6 Gagasan Pemecahan Isu……...26

Tabel 3.7 Tolak Ukur McNamara……27

Tabel 3.8 Analisis Gagasan Pemecahan Isu Berdasarkan McNamara…….27

Tabel 4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS……..27

Tabel 4.2 Daftar Kendala dan Strategi Menghadapinya……..33

Tabel 4.3 Dampak Kegiatan…….34

Tabel 4.4 Dampak Kegiatan Berdasarkan Horizon Waktu……..34

Tabel 4.5 Jadwal Rencana Kegiatan……36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Setjen DPR RI……...6

Gambar 3.1 Hasil Tangkapan Layar Tayangan TV Parlemen di Tanggal 14 Agustus 2025 tentang Dokumenter Info Kinerja DPR RI……12

Gambar 3.2 Hasil Tangkapan Layar Spotify Radio Parlemen di Tanggal 14 Agustus 2025 yang belum menampilkan Dokumenter Info Kinerja DPR RI……12

Gambar 3.3 Tangkapan Layar tentang Belum Adanya Database Masa Per Persidangan……15

Gambar 3.4 Tangkapan Layar tentang Belum Adanya Kesimpulan di TVR Parlemen……..18

Gambar 3.5 Tangkapan Layar Deskripsi Salah Satu Video di Youtube TV Parlemen…….19

Gambar 3.6 Diagram *Fishbone*…….19

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (Latsar CPNS) merupakan tahap penting dalam menyiapkan aparatur sipil negara yang profesional, berintegritas, serta menjunjung nilai-nilai dasar ASN. Latsar bukan sekadar pengenalan fungsi dan peran ASN, melainkan juga proses internalisasi nilai BerAKHLAK sebagai *core values*, sekaligus menguatkan kedudukan ASN sebagai pelayan publik, perekat persatuan bangsa, dan pelaksana kebijakan negara.

Penyelenggaraan Latsar CPNS memiliki landasan hukum yang jelas, di antaranya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara serta Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 10 sebagai perubahan atas Peraturan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Latsar CPNS. Aturan tersebut menegaskan bahwa Latsar wajib diikuti setiap CPNS sebagai syarat pembentukan kompetensi, integritas, dan karakter sebelum diangkat menjadi PNS.

Di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI, Latsar menekankan penyusunan rancangan aktualisasi sebagai bagian esensial dari pelatihan. Rancangan ini berfungsi menghubungkan teori dan materi yang dipelajari dengan praktik nyata di unit kerja. Melalui proses aktualisasi, peserta dilatih untuk mengenali persoalan, merancang solusi yang tepat, serta menyesuaikan langkah implementasi dengan visi, misi, dan tugas pokok Setjen DPR RI.

Aktualisasi juga dirancang untuk membentuk ASN yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan tanggap terhadap dinamika organisasi. Peserta tidak hanya dilatih membuat gagasan atau program, tetapi juga mengasah keterampilan komunikasi, kerja sama tim, dan pengambilan keputusan berdasarkan akuntabilitas serta kepentingan masyarakat. Dengan demikian, ASN dipersiapkan menjadi aparatur yang mampu memberikan kontribusi nyata sekaligus menghayati etika dan profesionalisme dalam setiap pelaksanaan tugas.

Melalui penerapan rancangan aktualisasi di Setjen DPR RI, diharapkan mutu pelayanan publik dapat meningkat, kinerja DPR RI lebih optimal, serta prinsip good governance semakin terimplementasi. Peserta Latsar pun dituntut untuk mengaplikasikan ilmu dan nilai yang diperoleh dalam pekerjaan sehari-hari, dengan menonjolkan adaptasi, inovasi, dan kolaborasi yang mencerminkan sosok ASN berdaya saing global.

B. Dasar Hukum

Adapun yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan rancangan aktualisasi pelatihan dasar ini adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara: Menetapkan kewajiban CPNS untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar sebagai syarat pengangkatan menjadi PNS, serta pengembangan kompetensi ASN.
2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil : Menegaskan Latsar sebagai salah satu bentuk pengembangan kompetensi, serta prasyarat pengangkatan CPNS menjadi PNS.
3. Perlan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil
4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah
5. Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI
6. Persekjen DPR RI Nomor 12 Tahun 2023 tentang perubahan Ketiga atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI
7. Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang perubahan Keempat atas Persekjen DPR RI Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Setjen DPR RI.
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, yang mengatur fungsi, tujuan, dan tata kelola penyiaran sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, serta kontrol sosial.
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang menjamin hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan, dan dengan cara yang sederhana

C. Tujuan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penyusunan rancangan aktualisasi ini memiliki dua sasaran utama, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

a. Tujuan Umum

i. Mengaitkan pengetahuan dan teori yang diperoleh selama Latsar CPNS dengan penerapannya secara nyata di unit kerja.
ii. Menanamkan nilai-nilai dasar ASN BerAKHLAK dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.
iii. Membentuk sosok ASN yang profesional, adaptif, serta berorientasi pada pelayanan publik.

b. Tujuan Khusus

i. Mengembangkan kompetensi peserta sesuai dengan peran dan fungsi jabatan sebagai Pengendali Konten Internet.
ii. Melatih kemampuan peserta dalam mengenali permasalahan, menganalisis situasi, serta menyusun solusi yang relevan dan dapat diterapkan.
iii. Mendorong lahirnya inovasi yang berkontribusi pada peningkatan kualitas pengelolaan konten digital di lingkungan Setjen DPR RI.
iv. Mewujudkan ide-ide kreatif sebagai langkah nyata dalam mengatasi isu yang muncul di unit kerja penulis.

D. Manfaat

Selain memiliki arah dan tujuan yang terukur, pelaksanaan aktualisasi juga menghadirkan manfaat yang berarti, baik bagi peserta, instansi, maupun masyarakat luas. Adapun manfaat yang dimaksud antara lain:

a. Bagi Peserta

i. Mendapatkan pengalaman langsung dalam menerapkan nilai-nilai ASN.
ii. Mengembangkan keterampilan kerja, komunikasi, serta kemampuan bekerja sama.
iii. Membentuk pribadi yang profesional dan berintegritas sebagai calon PNS.

b. Bagi Instansi (Setjen DPR RI) dan TVR Parlemen

i. Mendapatkan kontribusi konkret dari peserta berupa gagasan, inovasi, maupun upaya perbaikan di unit kerja.

ii. Mendukung peningkatan kualitas layanan informasi publik melalui optimalisasi peran TVR Parlemen.
iii. Menjadi bahan masukan dalam penguatan tata kelola, inovasi program, dan konsistensi narasi komunikasi DPR RI
iv. Terbangunnya budaya kerja yang sejalan dengan nilai-nilai BerAKHLAK.

c. Bagi Masyarakat/Pemangku Kepentingan

i. Mendapatkan layanan publik yang lebih cepat tanggap, transparan, dan berkualitas.
ii. Terwujud interaksi publik yang lebih sehat melalui tata kelola konten internet yang profesional.

BAB II
PROFIL ORGANISASI DAN JABATAN

A. Visi dan Misi Organisasi

Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (Setjen DPR RI) merupakan unsur penunjang DPR, yang berkedudukan sebagai Kesekretariatan Lembaga. Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia (Perpres) Nomor 16 Tahun 2023 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dinyatakan bahwa Setjen DPR RI adalah aparatur pemerintah yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Pimpinan DPR RI.

Sekretariat Jenderal DPR RI menetapkan sasaran strategis yaitu "Terwujudnya tata Kelola kelembagaan system pendukung DPR RI yang professional,akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi".

Untuk mewujudkan sasaran strategis tersebut, ditetapkanlah sasaran program sebagai berikut:

1. Terwujudnya layanan Setjen DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk memperlancar pelaksanaan fungsi dan peran DPR RI yang berkualitas melalui dukungan persidangan, administrasi, keahlian, dan pengawasan internal yang andal.
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai sistem pendukung DPR RI yang profesional, akuntabel, dan modern untuk menguatkan fungsi dan peran DPR RI dalam kerangka reformasi birokrasi

Sekretariat Jendera DPR RI memiliki kedudukan strategis dalam mendukung DPR RI menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Oleh karena itu, visi dan misi yang dirumuskan tidak hanya menjadi pedoman kerja internal, tetapi juga cerminan komitmen dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Adapun visi dan misinya sebagai berikut:

a. Visi Sekretariat Jendera DPR RI

Adapun yang menjadi Visi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah:

i. Menjadi Sekretariat Jenderal yang Profesional dan Modern dalam mendukung Visi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

b. Misi Sekretariat Jendera DPR RI

Adapun yang menjadi Misi Sekretariat Jenderal DPR RI adalah:

i. Memberikan dukungan dan pelayanan prima bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

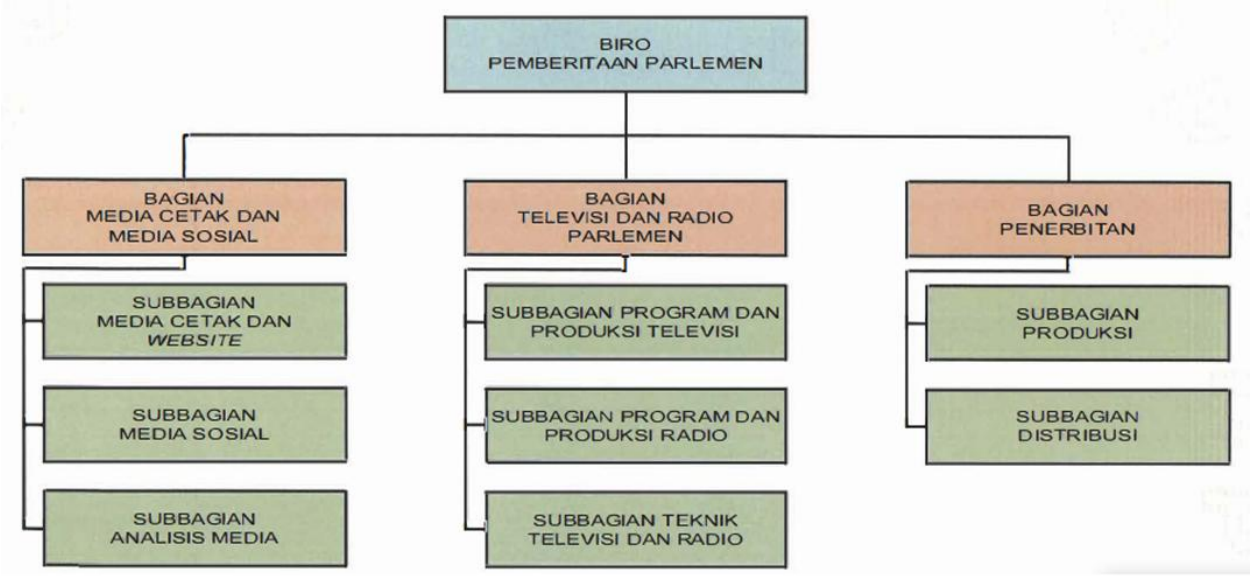
ii. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang profesional, baik, dan bersih di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

iii. Menyajikan data yang lengkap, akurat, dan andal sebagai bahan dalam pengambilan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

B. Struktur Unit Kerja

Biro Pemberitaan Parlemen merupakan salah satu unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI yang memiliki peran strategis dalam mendukung tugas dan fungsi DPR RI, khususnya dalam bidang penyebarluasan informasi, pengelolaan publikasi, serta penguatan komunikasi antara DPR RI dengan masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara efektif, Biro Pemberitaan Parlemen memiliki struktur organisasi yang mengatur pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab antar bagian. Struktur ini dirancang agar setiap bagian dapat saling bersinergi dalam mewujudkan pelayanan informasi yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik.



Gambar 1 Struktur Organisasi

Biro Pemberitaan Parlemen memiliki tugas pokok menyelenggarakan dukungan pemberitaan di media cetak dan media sosial, pengelolaan televisi dan radio, serta pengelolaan urusan penerbitan. Adapun kelembagaan Biro Pemberitaan Parlemen diatur berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI, terakhir diubah melalui Peraturan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 6 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Biro Pemberitaan Parlemen menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan evaluasi rencana, program dan anggaran di lingkungan Biro Pemberitaan Parlemen;
2. Penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemberitaan di media cetak dan media sosial, televisi dan radio parlemen, dan penerbitan;
3. Penyelenggaraan pemberitaan di media cetak, media sosial, dan website;
4. Penyelenggaraan televisi dan radio;
5. Penyelenggaraan urusan penerbitan;
6. Penyusunan laporan kinerja Biro Pemberitaan Parlemen; dan
7. Pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Deputi Bidang Persidangan

Bagian Televisi dan Radio Parlemen memiliki tugas untuk mengelola televisi dan radio. Dalam pelaksanaannya, bagian ini menjalankan fungsi sebagai berikut:

1. Menyusun rencana kegiatan dan anggaran Bagian Televisi dan Radio Parlemen
2. Menyusun bahan kegiatan terkait pengelolaan televisi dan radio
3. Mengelola program dan produksi televisi
4. Mengelola aspek teknis televisi
5. Mengelola siaran radio
6. Melaksanakan urusan tata usaha Bagian Televisi dan Radio Parlemen.
7. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi kepada Kepala Biro Pemberitaan Parlemen

C. Tugas dan Fungsi Jabatan Peserta

Adapun tugas dan fungsi jabatan Pengendali Konten Internet sesuai dengan Kemenpanrb No.11 tahun 2024 tentang Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi

Pemerintah adalah sebagai berikut melakukan kegiatan yang meliputi koordinasi, penerimaan dan pengumpulan aduan, pengklasifikasian, analisa serta verifikasi data konten internet untuk menyimpulkan dan menyusun pemblokiran konten internet ilegal sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan program yang telah disusun dan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan Keputusan Sekretaris Jenderal DPR RI Nomor 2394/SEKJEN/2024 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI Tahun 2024. Jabatan ini memiliki fungsi utama mengelola dan mengendalikan konten digital agar selaras dengan standar penyiaran, prinsip keterbukaan informasi publik, serta mendukung citra positif DPR RI.

Sesuai dengan Keputusan tersebut juga **disampaikan Tugas Pokok dari Pengendali Konten Internet**, sebagai berikut:

1. **Menyusun konsep kerangka acuan kerja terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan.**
2. **Menyusun konsep pedoman atau aturan tentang pelaksanaan kegiatan pada unit kerja terkait.**
3. **Melaksanakan kegiatan pengelolaan aplikasi/ database output/ media elektronik unit kerja terkait.**
4. **Melaksanakan dan menyusun laporan kegiatan.**
5. **Mengumpulkan bahan penyusunan konsep laporan kinerja.**
6. Menjalankan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.

Di bab selanjutnya, penulis akan berfokus mengidentifikasi isu du unit kerja yang berkaitan dengan gabungan tugas pokok di atas yaitu poin nomor 1,2,3, 4 dan 5 yaitu menyusun konsep kerangka acuan kerja, menyusun konsep pedoman, melaksanakan *database output*, melaksanakan dan menyusun laporan dan mengumpulkan bahan penyusunan naskah dokumenter.

Secara khusus, penulis ditempatkan di Divisi Produksi TVR Parlemen di bawah koordinasi Kepala Subbagian Program dan Produksi TV. Sub kerja yang dijalankan meliputi:

1. Memimpin seluruh tahapan produksi suatu acara, mulai dari perencanaan, penulisan naskah, produksi, hingga final editing.

2. Berkoordinasi dengan tim teknis dan redaksi untuk memastikan kesesuaian konten dengan visi, misi, dan fungsi TVR Parlemen.
3. Menjamin kualitas konten yang diproduksi sesuai standar penyiaran dan mendukung prinsip transparansi informasi publik DPR RI.

BAB III
PENETAPAN ISU PRIORITAS

A. Identifikasi Isu

Kehadiran TVR Parlemen sebagai ujung tombak pemberitaan parlemen berperan penting dalam mendorong keterbukaan informasi publik. Fungsi utamanya sebagai penyedia sekaligus penyalur informasi dijalankan melalui liputan langsung serta program siaran yang menampilkan isu dan agenda kerja anggota DPR RI. Namun, dalam pelaksanaannya, peran tersebut kerap menghadapi berbagai kendala yang dapat menghambat efektivitas fungsi yang diemban.

Tantangan-tantangan ini perlu segera diatasi agar proses penyampaian informasi kepada masyarakat berjalan lebih optimal. Berdasarkan pengalaman penulis selama dua bulan di bidang penulisan naskah dokumenter Produksi TVR Parlemen, teridentifikasi tiga isu utama yang akan dibahas lebih lanjut. Sebagai media penyebar informasi mengenai kinerja dan kegiatan DPR RI, TVR Parlemen memiliki posisi strategis yang tidak tergantikan. Untuk mewujudkan peran tersebut secara maksimal, dibutuhkan pola kerja yang profesional, kreatif, serta konsisten di berbagai platform. Kendati demikian, praktik di lapangan masih menunjukkan adanya hambatan yang memengaruhi efektivitas produksi maupun distribusi konten.

a. Rumusan Isu

Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai permasalahan yang ada, berikut penulis sajikan tabel rumusan isu yang memuat kondisi saat ini, dampak jika isu tidak ditangani, serta kondisi yang diharapkan.

Tabel 3.1 Rumusan Isu

No.	Rumusan Isu	Kondisi Saat Ini (Data dan Fakta)	Dampak Jika Tidak Dilaksanakan	Kondisi yang Diharapkan	Keterkaitan dengan Kedudukan dan Peran ASN Mendukung SMART Governance
1.	Ketiadaan Platform Alternatif Selain YouTube	Tayangan dokumenter TVR Parlemen belum tersedia dalam	Tidak tersedianya format audio di platform selain	Menghadirkan format audio dari tayangan dokumenter TVR	ASN sebagai pelayan publik yang dituntut adaptif, inovatif, dan inklusif dalam

	sebagai Tantangan dalam Distribusi Tayangan Dokumenter TVR Parlemen	format audio untuk platform selain youtube.	youtube membuat TVR Parlemen kehilangan peluang menjangkau generasi muda, mengurangi inklusivitas informasi, membatasi brand awareness, serta menurunkan efisiensi pemanfaatan konten, sehingga proses kerja dalam memperluas jangkauan publikasi dan memaksimalkan distribusi konten ikut terhambat.	Parlemen dan mendistribusikannya melalui platform audio digital seperti contohnya Spotify jangkauan audiens—terutama generasi muda—bisa lebih luas, informasi parlemen lebih inklusif bagi masyarakat, brand awareness TVR Parlemen meningkat karena hadir di platform populer, serta konten yang sudah diproduksi dapat dimanfaatkan lebih efisien lintas media.	mendukung SMART Governance, karena mampu memanfaatkan teknologi digital untuk memperkuat transparansi, meningkatkan akses informasi, dan membangun citra lembaga yang modern serta responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
2.	Ketiadaan Basis Data per Masa Persidangan yang Menghambat Proses Penyusunan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI	Ketiadaan database terintegrasi membuat proses produksi TVR Parlemen, khususnya naskah dokumenter, kurang optimal, memakan waktu,	Ketiadaan database terintegrasi per masa sidang membuat proses penulisan dan produksi dokumenter kinerja DPR RI	Membangun database terintegrasi per masa sidang untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi informasi, menjaga kepercayaan publik,	ASN di TVR Parlemen diharapkan membangun database terintegrasi per masa sidang untuk mempercepat proses kerja, meningkatkan akurasi informasi,

		dan berisiko menurunkan kepercayaan publik.	terhambat, sehingga menurunkan efisiensi, akurasi informasi, kualitas konten, profesionalisme, kepercayaan publik, inovasi, dan daya saing TVR Parlemen.	serta memperkuat daya saing TVR Parlemen.	menjaga kepercayaan publik, serta memperkuat daya saing lembaga, selaras dengan perannya mendukung SMART Governance yang transparan dan efisien, sekaligus mewujudkan SMART ASN yang profesional, adaptif, dan berbasis digital.
3.	Ketiadaan Penyajian Kesimpulan Rapat dalam Tayangan TVR Parlemen sebagai Hambatan Pemahaman Publik terhadap Hasil Kerja DPR RI	Banyak mispersepsi hasil rapat di media sosial. Tanpa kesimpulan umum hasil rapat di video rapat dan dokumenter youtube TV Parlemen maka informasi berisiko dipahami berbeda atau dipelintir untuk kepentingan tertentu.	Tanpa kesimpulan terstandar dapat menimbulkan kesalahpahaman publik, menurunkan kredibilitas TVR Parlemen, memicu narasi liar, serta menyulitkan dokumentasi arsip rapat secara utuh dan konsisten.	Menetapkan format kesimpulan umum yang terstandar pada setiap tayangan rapat di TVR Parlemen agar informasi lebih jelas, kredibel, bebas dari distorsi, serta terdokumentasi dengan baik untuk kepentingan publik maupun arsip internal DPR RI.	ASN diharapkan menetapkan format kesimpulan umum yang terstandar pada setiap tayangan rapat di TVR Parlemen untuk memastikan informasi jelas, kredibel, dan terdokumentasi dengan baik, sejalan dengan perannya dalam mendukung SMART Governance yang transparan dan akuntabel serta mewujudkan SMART ASN yang profesional, responsif, dan berorientasi pelayanan publik.

b. Deskripsi Isu

Untuk memperjelas isu yang telah dirumuskan, berikut adalah deskripsi singkat mengenai permasalahan tersebut.

1. Ketiadaan Platform Alternatif Selain YouTube sebagai Tantangan dalam Distribusi Tayangan Dokumenter TVR Parlemen

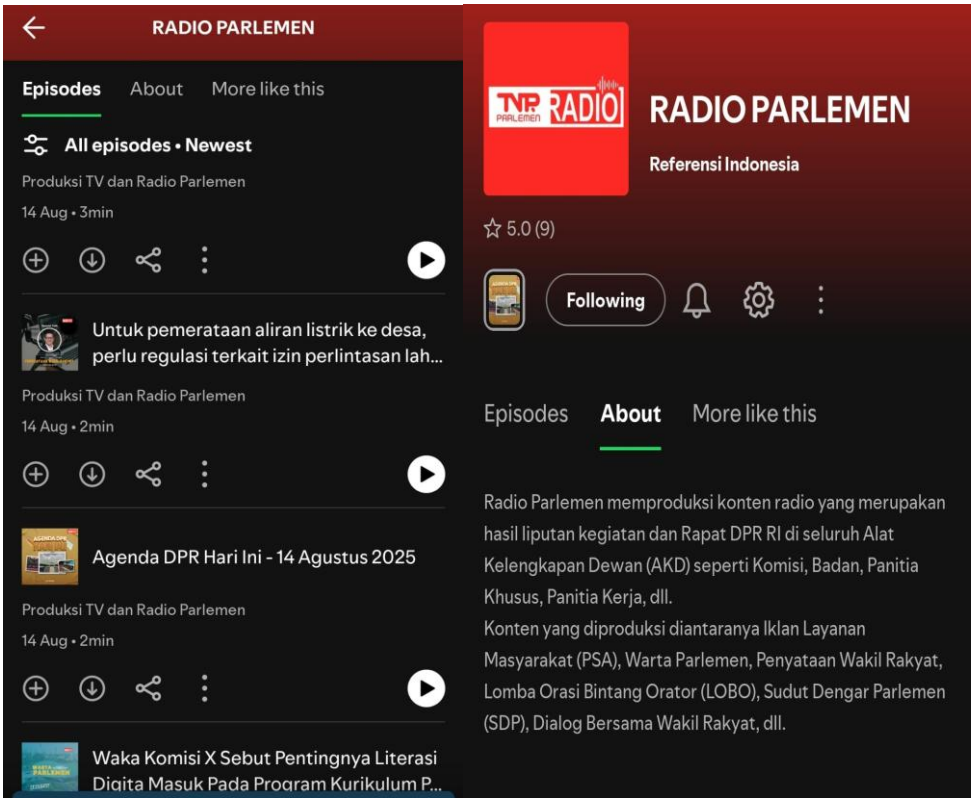
1.1 Kondisi Saat Ini

Masalah yang muncul adalah belum tersedianya format audio dari tayangan video dokumenter yang diproduksi. Selama ini, konten dokumenter TVR Parlemen hanya dikemas dalam bentuk audio visual, dan belum diadaptasi ke platform berbasis audio selain youtube. Padahal ada saluran Radio Parlemen di platform seperti Spotify yang sudah bisa menampilkan audio dan visual secara bersamaan.

Berikut eviden bahwa hanya youtube sebagai media yang belum menampilkan video dokumenter khususnya Info Kinerja yang tayang di tanggal 14 Agustus 2025.



Gambar 3.1 Hasil Tangkapan Layar Tayangan TV Parlemen di Tanggal 14 Agustus 2025 tentang Dokumenter Info Kinerja DPR RI



Gambar 3.2 Hasil Tangkapan Layar Spotify Radio Parlemen di Tanggal 14 Agustus 2025 yang belum menampilkan Dokumenter Info Kinerja DPR RI

1.2 Dampak Isu

Potensi untuk memperluas jangkauan audiens, khususnya generasi muda dan pengguna aktif podcast, menjadi terhambat. Dampak dari tidak adanya audio tentang TVR Parlemen selain youtube padahal dapat memberi efek yang cukup signifikan bagi upaya memperluas jangkauan publikasi DPR RI.

Pertama, hilangnya peluang menjangkau audiens baru, terutama generasi muda yang lebih banyak mengakses konten audio digital.

Kedua, informasi parlemen menjadi kurang inklusif, karena masyarakat yang lebih nyaman mendengarkan ketimbang menonton,misalnya saat berkendara atau beraktivitas, tidak bisa mengaksesnya.

Ketiga, *brand awareness* TVR Parlemen menjadi terbatas, sebab tidak hadir di salah satu platform populer yang dapat meningkatkan citra modern dan adaptif terhadap perkembangan media.

Keempat, efisiensi pemanfaatan konten berkurang, karena dokumenter video yang sudah diproduksi tidak dimaksimalkan ke format lain yang potensial. Akibatnya, TVR Parlemen berisiko kehilangan momentum untuk bersaing dengan media lain yang sudah lebih dulu memanfaatkan platform audio digital.

a. Manajemen ASN

Isu belum adanya belum tersedianya format audio dari tayangan video dokumenter yang diproduksi selain di youtube TV Parlemen berkaitan erat dengan manajemen ASN, karena menunjukkan perlunya yaitu inovasi dan adaptasi ASN dalam mengelola konten lintas platform agar lebih mudah diakses publik.

Kompetensi digital ASN untuk mengonversi dan mengoptimalkan konten sesuai kebutuhan audiens, pelayanan publik yang lebih inklusif, sehingga masyarakat dapat memilih format yang sesuai (audio maupun video), kolaborasi antarunit ASN dalam perencanaan, produksi, dan distribusi konten agar efisien dan berdampak luas. Singkatnya, isu ini menegaskan bahwa manajemen ASN harus responsif, adaptif, dan kreatif dalam mendukung layanan informasi publik.

b. SMART ASN

Dari perspektif SMART ASN, belum tersedianya format audio alternatif dari tayangan video dokumenter di media selain TV Parlemen menunjukkan bahwa ASN perlu lebih siaga terhadap perubahan kebutuhan masyarakat dalam mengakses informasi. Transformasi digital menuntut ASN tidak hanya mampu memproduksi konten, tetapi juga menguasai teknologi agar pesan yang disampaikan dapat menjangkau audiens dengan berbagai preferensi, termasuk mereka yang lebih nyaman mendengar audio.

Selain itu, isu ini menekankan pentingnya sikap adaptif, kolaboratif, dan terampil dalam memberikan layanan publik. Dengan menghadirkan format audio, ASN dapat memperluas jangkauan informasi, meningkatkan inklusivitas, sekaligus menunjukkan inovasi dalam pelayanan. Hal ini selaras dengan semangat SMART ASN yang menuntut aparatur untuk gesit, kreatif, dan responsif terhadap tantangan zaman.

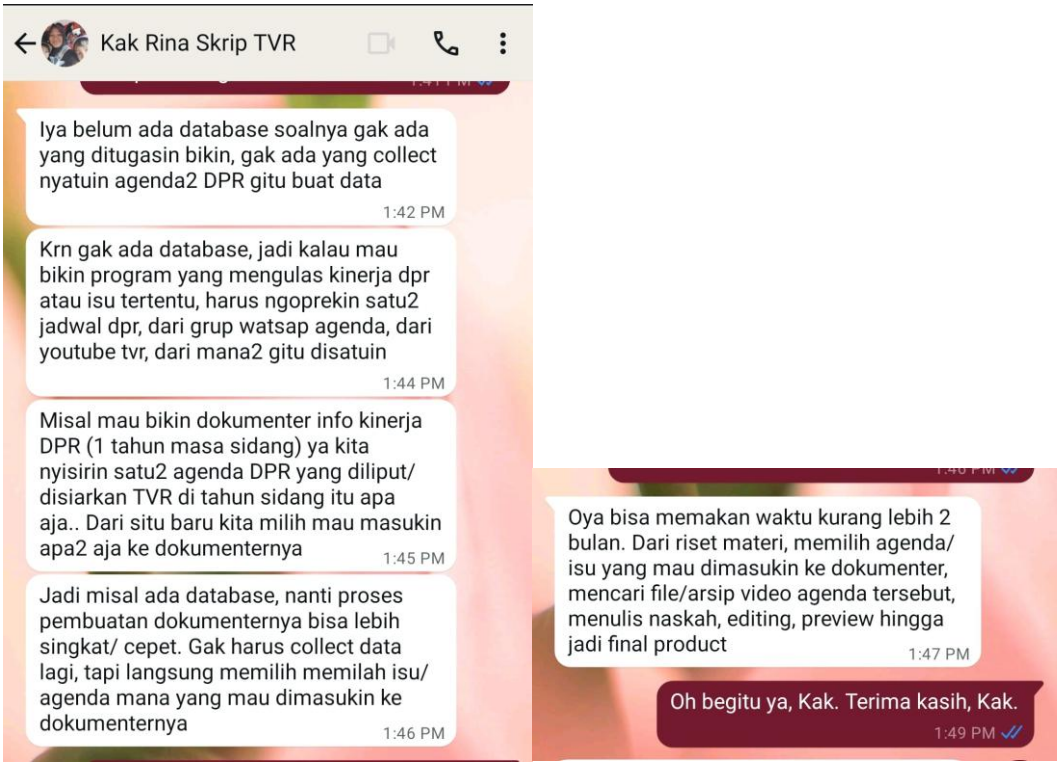
2. Ketiadaan Basis Data per Masa Persidangan yang Menghambat Proses Penyusunan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI

2.1 Kondisi Saat Ini

Kondisi saat ini menunjukkan bahwa kebutuhan akan *database* terintegrasi semakin mendesak bagi TVR Parlemen. Di tengah tingginya ekspektasi publik terhadap keterbukaan informasi dan kualitas tayangan, ketiadaan basis data membuat proses produksi naskah dokumenter dan laporan kinerja DPR RI kurang optimal.

Tim produksi masih bergantung pada pencarian data manual yang memakan waktu, sementara arus informasi yang cepat menuntut penyajian berita dan dokumenter secara tepat dan akurat. Ketidakselarasan ini menimbulkan risiko menurunnya kepercayaan publik, sekaligus membatasi kemampuan TVR Parlemen untuk berinovasi dan bersaing dengan media lain yang sudah lebih maju dalam pemanfaatan teknologi data.

Berdasarkan wawancara dengan Citra Ananda, selaku mentor dan Penata Kelola Sistem Jaringan Penyiaran juga Rina Yuli Arti, selaku penulis naskah dokumenter dan Penata Acara di TVR Parlemen didapat bahwa isu ini memiliki urgensi.



Gambar 3.3 Tangkapan Layar tentang Belum Adanya Database Masa Per Persidangan

2.2 Dampak Isu

Pembuatan dokumenter info kinerja setahun masa sidang dibutuhkan di akhir masa sidang. Sehingga harapannya di akhir masa sidang adanya pembuatan *database* untuk memudahkan penyusunan dokumenter masa sidang.

Namun, dalam praktiknya penulis naskah di TVR Parlemen masih menghadapi kendala serius, yaitu keterbatasan database per masa persidangan. Ketiadaan basis data yang lengkap dan terstruktur membuat proses penulisan naskah, khususnya untuk program dokumenter kaleidoskop maupun laporan kinerja DPR RI, menjadi terhambat.

Alur kerja produksi yang seharusnya efisien justru terkesan berulang, karena tim harus mengumpulkan data manual dari berbagai unit atau arsip yang tersebar. Kondisi ini tidak hanya memperlambat waktu produksi, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas informasi yang disampaikan kepada publik. Pada akhirnya, kurangnya database berdampak langsung terhadap daya saing dan profesionalisme TVR Parlemen dalam memberikan layanan informasi yang akurat, cepat, dan transparan.

Jika dibuat ke dalam poin maka dampak dari isu ini adalah:

1. **Keterlambatan Produksi**
   Karena data harus dikumpulkan manual dari berbagai unit, alur kerja menjadi lambat dan tidak efisien.
2. **Informasi Kurang Akurat**
   Data yang tersebar berisiko menimbulkan kesalahan atau ketidaklengkapan informasi dalam naskah dan tayangan.
3. **Kualitas Konten Menurun**
   Terhambatnya akses data dapat membuat tayangan dokumenter maupun laporan kinerja kurang tajam, komprehensif, dan mendalam.

4. **Profesionalisme Dipertanyakan**

   Jika informasi yang disajikan tidak konsisten atau terlambat, kredibilitas dan profesionalisme TVR Parlemen bisa diragukan publik.

5. **Turunnya Kepercayaan Publik**

   Publik bisa kehilangan keyakinan terhadap akurasi dan transparansi informasi yang disampaikan DPR RI melalui TVR Parlemen.

6. **Hambatan Inovasi**

   Tanpa database terintegrasi, sulit bagi TVR Parlemen untuk mengembangkan format baru, misalnya arsip digital, audio podcast, atau infografis berbasis data.

7. **Daya Saing Melemah**

   Dibandingkan media lain yang sudah memanfaatkan teknologi data modern, TVR Parlemen berisiko tertinggal dalam hal kecepatan dan kualitas informasi.

A. Manajemen ASN

Kaitan manajemen ASN dengan isu belum adanya database per masa persidangan untuk pembuatan dokumenter kaleidoskop dan info kinerja di TVR Parlemen terletak pada aspek efisiensi kerja, akuntabilitas, dan pengelolaan data**.** Tanpa database yang rapi dan terintegrasi, ASN kesulitan mengakses data historis, sehingga proses penyusunan dokumenter dan laporan kinerja menjadi lambat, tidak sistematis, bahkan rawan terjadi kesalahan informasi.

Dari perspektif manajemen ASN, ketersediaan database adalah wujud penerapan sistem merit, karena mendukung kinerja berbasis data dan bukti. Dengan adanya database, ASN dapat lebih mudah menyusun konten yang akurat, meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, serta memperkuat transparansi lembaga. Hal ini juga mendorong pengembangan kompetensi ASN di bidang literasi digital dan tata kelola data, yang sangat penting dalam era birokrasi modern.

B. SMART ASN

Kaitan SMART ASN dengan belum adanya *database* per masa persidangan di TVR Parlemen menegaskan pentingnya ASN yang siaga terhadap perubahan dan mampu menguasai teknologi. Tanpa *database* yang rapi, proses pembuatan

dokumenter kaleidoskop maupun info kinerja menjadi lambat, tidak sistematis, dan berisiko kurang akurat. Kondisi ini menuntut ASN untuk *agile* atau gesit dalam membangun sistem pencatatan yang lebih modern agar kebutuhan informasi bisa terpenuhi dengan cepat dan tepat.

Selain itu, isu ini juga menyoroti pentingnya kolaborasi lintas unit dalam mengelola data agar terintegrasi, sekaligus meningkatkan keterampilan ASN dalam memberikan pelayanan publik berbasis informasi yang akurat dan inklusif. Dengan adanya database, ASN dapat menyajikan konten yang lebih berkualitas, memperkuat transparansi, serta menghadirkan inovasi layanan informasi. Inilah wujud nyata implementasi nilai-nilai SMART ASN dalam mendukung kinerja organisasi.

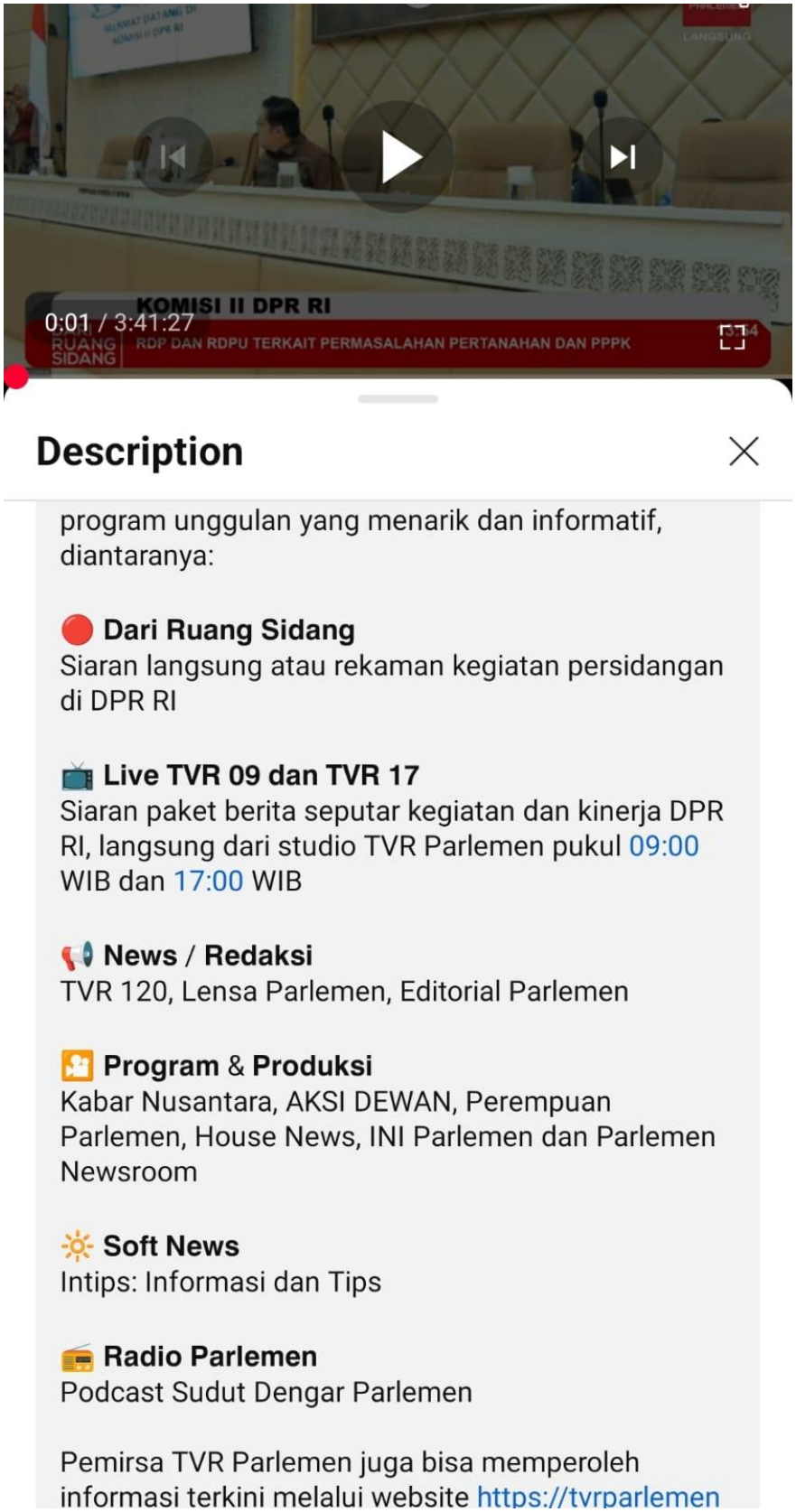
3. Ketiadaan Penyajian Kesimpulan Rapat dalam Tayangan TVR Parlemen sebagai Hambatan Pemahaman Publik terhadap Hasil Kerja DPR RI

3.1 Kondisi Saat Ini

Kondisi yang dikhawatirkan dari perlunya membuat kesimpulan umum hasil rapat di tiap tayangan TVR adalah potensi terjadinya distorsi informasi bila tidak ada rangkuman resmi yang jelas. Tanpa kesimpulan umum, isi rapat bisa dipahami berbeda-beda oleh audiens, bahkan berisiko dipelintir untuk kepentingan tertentu. Adapun yang menjadi bukti dari isu ini adalah sebagai berikut;



Gambar 3.4 Tangkapan Layar tentang Belum Adanya Kesimpulan di TVR Parlemen



Gambar 3.5 Tangkapan Layar Deskripsi Salah Satu Video di Youtube TV Parlemen

3.2 Dampak Isu

Hal ini dapat memunculkan kesalahpahaman publik, menurunkan kredibilitas TVR Parlemen sebagai saluran resmi informasi DPR RI, dan membuka ruang bagi munculnya narasi liar atau hoaks yang menyesatkan. Selain itu, ketiadaan kesimpulan terstandar juga bisa menyulitkan proses dokumentasi arsip, sehingga informasi rapat tidak terdokumentasi secara utuh dan konsisten untuk kebutuhan publik maupun internal DPR.

A. Manajemen ASN

Kaitan manajemen ASN dengan perlunya membuat kesimpulan umum hasil rapat di tiap tayangan TVR Parlemen terletak pada fungsi ASN sebagai pelaksana kebijakan publik sekaligus penyaji informasi yang akurat. Dengan kesimpulan yang jelas dan terstruktur, ASN dapat memastikan bahwa pesan inti dari rapat tersampaikan secara utuh, sehingga publik tidak salah paham atau memelintir isi pembahasan. Hal ini sejalan dengan prinsip akuntabilitas dalam manajemen ASN, di mana setiap informasi yang disampaikan harus dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, penyusunan kesimpulan umum di setiap tayangan juga merupakan bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik. ASN dituntut untuk memiliki kompetensi komunikasi yang baik, disiplin dalam merangkum hasil rapat, serta konsisten menjaga integritas informasi. Dengan cara ini, TVR Parlemen tidak hanya berfungsi sebagai media dokumentasi, tetapi juga sebagai sarana transparansi dan edukasi publik yang dikelola secara profesional melalui manajemen ASN yang efektif.

B. SMART ASN

Kaitan SMART ASN dengan perlunya membuat kesimpulan umum hasil rapat di tiap tayangan TVR Parlemen terlihat dari tuntutan agar ASN mampu siaga menghadapi perubahan arus informasi dan potensi disinformasi. Dengan menghadirkan kesimpulan yang ringkas dan jelas, ASN menunjukkan penguasaan teknologi komunikasi sekaligus agilitas dalam merespons kebutuhan publik akan informasi yang mudah dipahami. Langkah ini memastikan pesan inti rapat tersampaikan secara akurat, sehingga meminimalisasi risiko isi rapat dipelintir atau disalahartikan.

Selain itu, pembuatan kesimpulan umum mencerminkan nilai SMART ASN lainnya, yaitu kolaboratif dan terampil melayani masyarakat. Kesimpulan yang terstandar hanya bisa dihasilkan melalui kerja sama lintas unit dan komitmen untuk menghadirkan layanan informasi yang terpercaya. Dengan begitu, ASN tidak hanya menyampaikan hasil rapat, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif melalui penyajian informasi yang transparan, inklusif, dan profesional.

B. Penetapan Isu Prioritas

Dari ketiga isu yang sudah dibahas, maka langkah selanjutnya adalah menentukan isu mana yang paling mendesak untuk diperhatikan dan ditangani. Ketiga isu yang teridentifikasi, yaitu (1) Optimalisasi Spotify untuk Menayangkan Program TVR untuk Menjangkau Pengikut Baru; (2) Belum Adanya Database Per Masa Persidangan untuk Memudahkan Pembuatan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja; dan (3) Perlunya Membuat Kesimpulan Umum Hasil Rapat di Tiap Tayangan TVR agar Hasil Tidak Dipelintir Ketiga isu ini didapat setelah diberikan penilaian berdasarkan tingkat urgensi, keseriusan dampak, dan potensi perkembangan masalah jika tidak segera ditangani.

a. Teknik Analisis Isu

Di dalam tulisan ini penulis menggunakan pendekatan metode USG yang merupakan kepanjangan dari *Urgency, Seriousness, Growth* (Famil, 2021). Untuk mengidentifikasi isu dan akar masalah secara objektif maka diperlukan penilaian menggunakan aspek berikut:

- ***Urgency*** **(U)** **:** tingkat kebutuhan suatu isu untuk segera ditangani
- ***Seriousness*** **(S) :** tingkat keseriusan dampak yang ditimbulkan isu
- ***Growth*** **(G)** **:** potensi isu berkembang ke arah yang tidak baik apabila tidak ditangani

Tolak ukur penilaian untuk setiap kriteria juga diperlukan agar penilaian yang dilakukan penulis dapat bersifat objektif.

Tabel 3.2 Tolak Ukur *Urgency*

SKOR	TOLAK UKUR	INDIKATOR
1	Sangat Tidak Mendesak	Harus diselesaikan dalam waktu > 1 tahun
2	Tidak Mendesak	Harus diselesaikan dalam waktu 1 tahun
3	Cukup Mendesak	Harus diselesaikan dalam waktu 6 bulan

4	Mendesak	Harus diselesaikan dalam waktu 3 bulan
5	Sangat Mendesak	Harus diselesaikan dalam waktu 1 bulan

Tabel 3.2 Tolak Ukur *Seriousness*

SKOR	TOLAK UKUR	INDIKATOR
1	Sangat Tidak Serius	Sangat Tidak Berdampak
2	Tidak Serius	Tidak Berdampak
3	Cukup Serius	Cukup Berdampak
4	Serius	Berdampak
5	Sangat Serius	Berdampak

Tabel 3.2 Tolak Ukur *Growth*

SKOR	TOLAK UKUR	INDIKATOR
1	Sangat Tidak Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu >1 tahun terakhir
2	Tidak Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 1 tahun terakhir
3	Cukup Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 6 bulan terakhir
4	Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 3 bulan terakhir
5	Sangat Berkembang	Ada peningkatan permasalahan dalam kurun waktu 1 bulan terakhir

b.Pemilihan Isu Prioritas

Berdasarkan setiap tolak ukur kriteria yang ada, berikut hasil dari penilaian isu prioritas penulis.

Tabel 3.3 Pemilihan Isu Prioritas

NO	ISU AKTUAL	U	ALASAN	S	ALASAN	G	ALASAN	TOTAL SKOR
1	Ketiadaan Platform Alternatif Selain YouTube sebagai Tantangan	**4**	Agar informasi parlemen dapat menjangkau audiens baru, terutama generasi muda, melalui	**4**	Risiko hilangnya relevansi dan terbatasnya jangkauan audiens baru	**4**	Peluang memperluas jangkauan audiens, menarik pengikut baru, dan	**12**

	dalam Distribusi Tayangan Dokumenter TVR Parlemen		platform digital alternatif yang mereka gunakan sehari-hari.		jika tidak segera dilakukan.		memperkuat citra lembaga yang adaptif terhadap media digital.	
2	Ketiadaan Basis Data per Masa Persidangan yang Menghambat Proses Penyusunan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI	**5**	Tanpa database yang rapi, proses pembuatan dokumenter kaleidoskop dan info kinerja menjadi lambat dan rawan kesalahan informasi.	**5**	Ketiadaan database melemahkan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas informasi publik yang disampaikan.	**4**	Adanya database membuka peluang peningkatan efisiensi kerja, inovasi konten, dan perluasan jangkauan informasi kepada masyarakat.	**14**
3	Ketiadaan Penyajian Kesimpulan Rapat dalam Tayangan TVR Parlemen sebagai Hambatan Pemahaman Publik terhadap Hasil Kerja DPR RI	**4**	Tanpa kesimpulan umum, isi rapat rentan dipelintir dan menimbulkan kesalahpahaman publik.	**4**	Tanpa kesimpulan akan melemahkan akuntabilitas serta kredibilitas lembaga dalam menyampaikan informasi resmi.	**3**	Penyajian kesimpulan umum membuka peluang peningkatan transparansi, kepercayaan publik, dan kualitas layanan informasi.	**11**

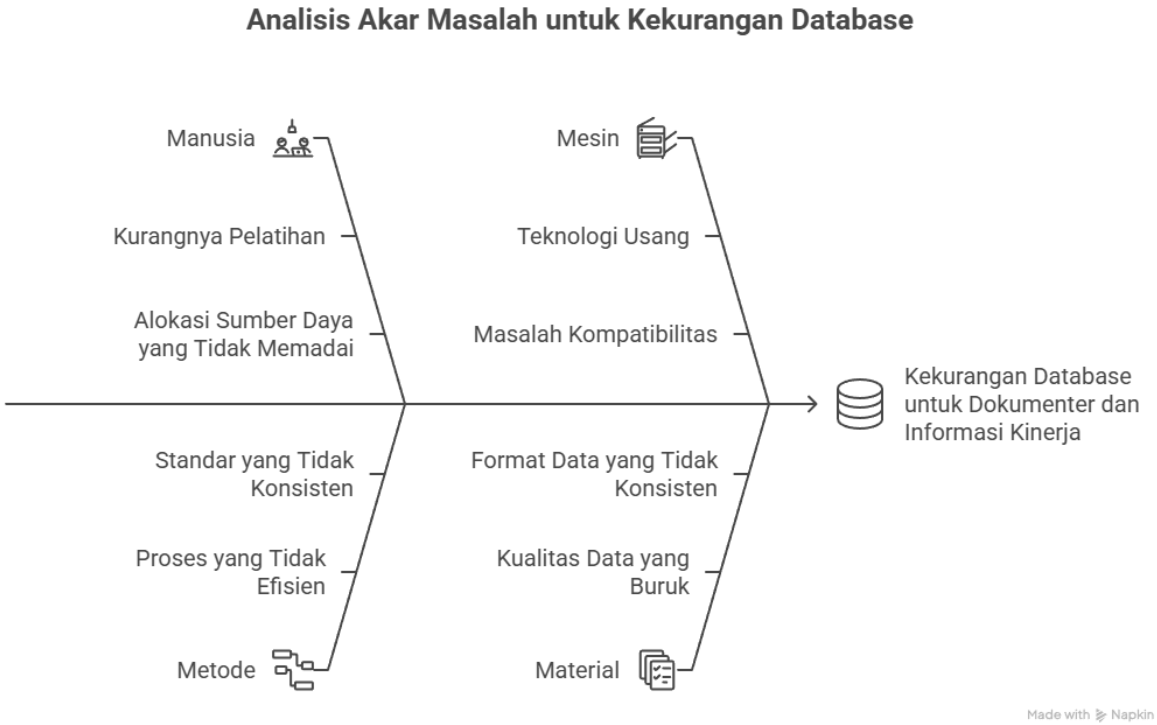
Berdasarkan tabel USG di atas didapat bahwa isu yang memiliki tingkat kepentingan, keseriusan dan akan memberi dampak yang signifikan untuk segera diperhatikan adalah isu nomor dua yaitu **Ketiadaan Basis Data per Masa Persidangan yang Menghambat Proses Penyusunan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI**. Maka isu ini akan ditetapkan menjadi isu prioritas yang akan diperhatikan dan diidentifikasi akar permasalahannya secara objektif.

Penulis merasa ini hal yang harus dibahas mengingat dampaknya signifikan kepada efektivitas alur kerja di bagian Produksi khususnya penulisan naskah dokumenter di TV Parlemen.

1. **Efisiensi Kerja**: Ketiadaan alur kerja yang jelas langsung memengaruhi kelancaran produksi, sehingga penulisan naskah dokumenter menjadi lebih lambat dan tidak sistematis.
2. **Kualitas Konten**: Dampaknya signifikan terhadap akurasi dan kelengkapan informasi dalam dokumenter, yang pada akhirnya memengaruhi citra profesional TV Parlemen.
3. **Transparansi dan Akuntabilitas**: Isu ini menentukan kemampuan TV Parlemen dalam menyajikan informasi yang terpercaya kepada publik, sehingga wajib dibahas sebagai prioritas perbaikan.

C. Penentuan Penyebab Terjadinya Isu Prioritas

Setelah menetapkan isu prioritas, tahap berikutnya adalah menganalisis akar permasalahan. Untuk itu, penulis memanfaatkan metode fishbone guna memetakan penyebab berdasarkan berbagai faktor yang berpengaruh dalam proses kerja.



Gambar 3.4 Diagram *Fishbone*

Dengan deskripsi berikut:

1. Kepala Ikan (Masalah Utama)

➔ Kekurangan Database untuk Dokumenter dan Informasi Kinerja

Masalah inti yang ingin dianalisis adalah ketiadaan atau kurangnya basis data yang memadai untuk kebutuhan dokumentasi dan penyajian informasi kinerja.

2. Tulang Punggung

➔Analisis Akar Masalah

Sumbu utama diagram berfungsi sebagai jalur untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab dari masalah utama.

3. Tulang Besar (Kategori Utama Penyebab)

Ada empat kategori besar penyebab yang berkontribusi:

- Manusia (Human)
- Mesin (Machine/Technology)
- Metode (Method)
- Material (Data/Information Resources)

D. **Tulang Kecil (Detail Penyebab Tiap Kategori)**

b. Manusia (Human):

- Kurangnya pelatihan → menyebabkan keterbatasan kemampuan dalam mengelola database.
- Alokasi sumber daya yang tidak memadai → tenaga kerja atau staf terbatas sehingga pengelolaan tidak optimal.

c. Mesin (Machine/Technology):

- Teknologi usang → infrastruktur IT tidak mendukung kebutuhan database modern.
- Masalah kompatibilitas → sistem dan software yang digunakan tidak saling terintegrasi.

d. Metode (Method):

- Standar yang tidak konsisten → tidak ada SOP baku dalam mengelola data.
- Proses yang tidak efisien → alur kerja panjang, berulang, dan menyulitkan konsolidasi data.

e. Material (Data/Information Resources):

- Format data yang tidak konsisten → menyulitkan integrasi dan pengolahan data.
- Kualitas data yang buruk → data tidak akurat, tidak lengkap, atau sulit diverifikasi.

Berdasarkan diagram fishbone, akar masalah kurangnya database untuk dokumenter dan informasi kinerja berasal dari beberapa faktor. Dari sisi manusia, ada keterbatasan pelatihan dan sumber daya; dari mesin, teknologi yang usang dan tidak kompatibel; dari metode, standar yang tidak konsisten dan proses yang tidak efisien; serta dari material, format data yang beragam dan kualitas data yang rendah. Masalah ini muncul karena gabungan semua faktor tersebut, sehingga solusinya perlu perbaikan menyeluruh pada kompetensi SDM, teknologi, metode kerja, dan pengelolaan data.

D. Gagasan Pemecahan Isu

Dari isu utama yang sudah ditentukan di atas,penulis mengusulkan gagasan ide sebagai gagasan kreatif pemecahan masalah.

Tabel 3.5 Gagasan Pemecahan Isu

No	Penyebab Utama	Gagasan Ide Pemecahan dengan Google Sheets
1	Kurangnya pelatihan dan kompetensi ASN dalam pengelolaan data	Menyelenggarakan pelatihan penggunaan Google Sheets untuk literasi digital dasar, termasuk manajemen data bersama, validasi data, serta fitur kolaborasi real-time.
2	Teknologi usang dan masalah kompatibilitas sistem	Menggunakan Google Sheets sebagai platform database sederhana yang dapat diakses lintas perangkat, otomatis tersinkronisasi, serta kompatibel dengan berbagai format (Excel, CSV).
3	Format dan standar data tidak konsisten	Membuat template standar di Google Sheets dengan format input seragam (misalnya dropdown, validasi data, kode warna), sehingga meminimalisir perbedaan input dan menjaga konsistensi data.

Gagasan yang ada kemudian ditapis menggunakan Teori Tapisan McNamara, yaitu metode analisis untuk menyaring alternatif solusi agar organisasi dapat mengambil keputusan yang rasional, terukur, dan kontekstual. Setiap ide dinilai berdasarkan tiga kriteria:

- **Efektivitas**: sejauh mana solusi mampu menyelesaikan masalah secara nyata.

- **Efisiensi**: hasil maksimal dengan penggunaan sumber daya minimal.
- **Kemudahan**: tingkat kemudahan implementasi di lingkungan kerja.

Tabel 3.6 Tolak Ukur McNamara

SKOR	KRITERIA
1	Sangat Tidak (Efektif/Efisien/Mudah)
2	Tidak (Efektif/Efisien/Mudah)
3	Cukup (Efektif/Efisien/Mudah)
4	Lebih (Efektif/Efisien/Mudah)
5	Sangat (Efektif/Efisien/Mudah)

Penggunaan metode ini diperlukan agar solusi yang dihasilkan tidak sekadar inovatif, tetapi juga praktis, efisien dalam penggunaan sumber daya, serta dapat diterima oleh para pemangku kepentingan.

Tabel 3.7 Analisis Gagasan Pemecahan Isu Berdasarkan McNamara

No.	Gagasan Kreatif	Efektivitas	Efisiensi	Kemudahan	Total	Alasan Singkat
1	Menyelenggarakan pelatihan penggunaan Google Sheets untuk literasi digital dasar, termasuk manajemen data bersama, validasi data, serta fitur kolaborasi real-time.	4	4	4	12	Gagasan ini menarik karena Google Sheets mudah digunakan, gratis, mendukung kolaborasi real-time, dan dapat langsung meningkatkan literasi digital ASN tanpa perlu investasi teknologi yang besar.
2	Menggunakan Google Sheets sebagai platform database sederhana	5	5	4	14	Google Sheets praktis, fleksibel, mudah diakses lintas perangkat,

	yang dapat diakses lintas perangkat, otomatis tersinkronisasi, serta kompatibel dengan berbagai format (Excel, CSV).					dan mendukung integrasi berbagai format data tanpa biaya tambahan.
3	Membuat template standar di Google Sheets dengan format input seragam (misalnya dropdown, validasi data, kode warna), sehingga meminimalisir perbedaan input dan menjaga konsistensi data.	5	5	3	13	*Template* standar di Google Sheets membantu menjaga konsistensi data, memudahkan input, dan mengurangi risiko kesalahan pencatatan.

Berdasarkan hasil tapisan McNamara, gagasan yang dipilih sebagai solusi utama adalah menggunakan Google Sheets sebagai platform database sederhana yang dapat diakses lintas perangkat, otomatis tersinkronisasi, serta kompatibel dengan berbagai format (Excel, CSV) dalam penulisan naskah dokumenter di TVR Parlemen.

Gagasan ini dinilai sebagai solusi efektif dan efisien karena mampu menjawab kebutuhan pengelolaan database dengan cara yang sederhana namun fungsional. Efektif, karena Google Sheets menyediakan akses lintas perangkat, sinkronisasi otomatis, serta integrasi berbagai format data sehingga memudahkan penulis naskah dalam mengumpulkan dan mengolah informasi secara cepat dan akurat.

Efisien, karena tidak memerlukan biaya tambahan untuk perangkat lunak khusus, dapat digunakan secara kolaboratif dalam waktu nyata, serta meminimalisir duplikasi kerja

dan kesalahan input. Dengan demikian, solusi ini tepat untuk mendukung penulisan naskah dokumenter di TVR Parlemen secara lebih terstruktur dan hemat sumber daya.

Untuk mewujudkan implementasi berdasar solusi ini maka beberapa kegiatan yang direkomendasikan adalah:

1. Membuat dan menetapkan template standar di Google Sheets agar data terdokumentasi dengan format seragam, rapi, dan mudah dipahami.
2. Menyelenggarakan pelatihan singkat bagi ASN terkait penggunaan Google Sheets, mulai dari manajemen data, validasi, hingga kolaborasi real-time.
3. Melakukan monitoring dan evaluasi berkala untuk memastikan database selalu terbarui, konsisten, dan siap digunakan dalam penulisan naskah dokumenter.

Dengan implementasi Google Sheets sebagai *platform database* sederhana, proses pengelolaan data untuk penulisan naskah dokumenter di TVR Parlemen akan menjadi lebih rapi, mudah diakses, dan efisien. Solusi ini sejalan dengan prinsip Manajemen ASN (akuntabilitas, profesionalisme, sistem merit) serta SMART ASN (literasi digital, kolaborasi, efisiensi kerja), sehingga mampu mendukung ASN dalam bekerja secara modern, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan informasi publik.

BAB IV
RANCANGAN AKTUALISASI

A. MATRIX RANCANGAN AKTUALISASI

Unit Kerja : TVR Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen

Identifikasi Isu :

1. Ketiadaan Platform Alternatif Selain YouTube sebagai Tantangan dalam Distribusi Tayangan Dokumenter TVR Parlemen
2. Ketiadaan Basis Data per Masa Persidangan yang Menghambat Proses Penyusunan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI
3. Ketiadaan Penyajian Kesimpulan Rapat dalam Tayangan TVR Parlemen sebagai Hambatan Pemahaman Publik terhadap Hasil Kerja DPR RI

Isu yang Diangkat : Ketiadaan Basis Data per Masa Persidangan yang Menghambat Proses Penyusunan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI

Gagasan Pemecahan Isu : Menggunakan Google Sheets sebagai platform database sederhana yang dapat diakses lintas perangkat, otomatis tersinkronisasi, serta kompatibel dengan berbagai format (Excel, CSV).

Tabel 4.1 Matriks Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar CPNS

No.	Kegiatan	Tahapan Kegiatan	*Output* Hasil	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda II Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-AKHLAK	Keterkaitan Substansi Mata Pelatihan Agenda III Manajemen ASN dan SMART ASN	Kontribusi Terhadap Visi/Misi/Tusi/Tujuan Organisasiss
1.	Mengidentifikasi kebutuhan data dan arsip dokumenter per masa persidangan	Mengumpulkan informasi dari tim produksi dan arsip terkait jenis data yang dibutuhkan	Daftar kebutuhan data dan format database	Kolaboratif (berAKHLAK): bekerja sama lintas unit untuk memahami kebutuhan data	Perencanaan dan Pengorganisasian Data (SMART ASN): efisiensi pengelolaan informasi	Mendukung misi TVR Parlemen dalam penyediaan informasi parlemen yang akurat dan terpercaya
2.	Melakukan koordinasi dengan tim dokumentasi dan arsip untuk pengumpulan data	Menjadwalkan pertemuan, membahas mekanisme input data, dan menentukan PIC	Notulen rapat koordinasi dan kesepakatan pengumpulan data	Adaptif dan Kolaboratif: menyesuaikan diri dengan sistem kerja lintas bidang	Manajemen Kolaborasi: membangun kerja tim dalam sistem informasi digital	Mendukung tujuan organisasi dalam memperkuat sistem dokumentasi kelembagaan
3.	Menyusun rancangan format database per masa persidangan	Mendesain template Google Sheets yang mudah diisi dan terstruktur	Draft format database digital per masa persidangan	Kompeten: menerapkan keterampilan digital dan administrasi data	Inovasi Digital (SMART ASN): penerapan teknologi untuk efisiensi kerja	Meningkatkan efektivitas penyusunan konten dokumenter kelembagaan
4.	Melakukan uji coba pengisian database dengan data dari satu masa persidangan	Menginput data uji, menilai kelengkapan dan kemudahan penggunaan format	Laporan hasil uji coba dan revisi format database	Akuntabel: memastikan data yang diinput valid dan dapat dipertanggungjawabkan	Evaluasi dan Monitoring: mengukur efektivitas sistem kerja baru	Meningkatkan kualitas dan kecepatan produksi dokumenter

5.	Mensosialisasikan penggunaan database kepada tim produksi dan dokumentasi	Mengadakan briefing singkat atau panduan tertulis untuk pengisian database	Panduan penggunaan database dan dokumentasi pelatihan	Harmonis: membangun komunikasi positif antar pegawai	Knowledge Sharing (SMART ASN): membangun literasi digital internal	Mendukung peningkatan kompetensi ASN di bidang pengelolaan data dan informasi
6.	Menerapkan penggunaan database secara berkala dalam proses produksi dokumenter	Mengintegrasikan database dalam perencanaan konten Kaleidoskop dan Info Kinerja	Database aktif yang digunakan rutin oleh tim	Loyal dan Berorientasi Hasil: berkomitmen terhadap peningkatan kinerja organisasi	Transformasi Digital: penerapan sistem kerja berbasis data	Mendukung visi TVR Parlemen menjadi media parlemen yang modern, informatif, dan terpercaya

B. *Stakeholder*

Pada kegiatan aktualisasi ini, diperlukan kolaborasi dan dukungan dari berbagai pihak agar kegiatan aktualisasi dapat terlaksana secara optimal. Setiap pihak yang terlibat memiliki kepentingan dan peran yang saling berkaitan, sehingga keterlibatan mereka menjadi faktor penting dalam kelancaran proses aktualisasi. Pada bagian berikut akan dipaparkan pihak-pihak yang berperan sebagai *stakeholder*:

Stakeholder yang terlibat dalam aktualisasi ini, diantaranya;

1. **Mochamad Meinuzur Widhi Nugroho, S.A.P., Kepala Sub-Bagian Program dan Produksi TV** menjadi pembimbing langsung dalam pelaksanaan aktualisasi. Beliau berperan memberikan arahan teknis, masukan, serta memastikan panduan respon komentar dapat diterapkan dalam operasional sehari-hari. Selain itu, Kasubbag juga mendukung monitoring hasil aktualisasi agar bermanfaat bagi tim
2. **Citra Ananda, S.I.Kom., Koordinator Divisi Produksi TVR Parlemen dan Mentor Penulis** yang berperan sebagai pembimbing utama dalam seluruh rangkaian proses aktualisasi, mulai dari tahap perencanaan hingga evaluasi akhir. Sejak awal, mentor memberikan arahan terkait pemilihan isu yang relevan dengan unit kerja, mengajak diskusi, dan membantu dalam proses penyusunan rancangan aktualisasi. Selama proses pelaksanaan, mentor mendampingi dan memberikan masukan agar setiap kegiatan berjalan sesuai tujuan untuk penyempurnaan hasil aktualisasi.
3. **Rina Yuli Arti, S.I.Kom, penulis naskah dokumenter Bagian Penata Acara TVR Parlemen sekaligus Perwakilan Divisi Produksi** yang mendukung penerapan panduan respon komentar dengan memberikan masukan praktis.
4. **Coach Indra Cakra Buana, S.A.P, M. Si** yang berperan sebagai fasilitator sekaligus pendamping dalam pelaksanaan aktualisasi. Tugas utamanya adalah memastikan peserta mampu menghubungkan nilai- nilai dasar ASN dan materi Latsar dengan isu yang diangkat. Sejak perencanaan, *coach* memberikan bimbingan teknis, mengarahkan alur kegiatan, serta memotivasi peserta agar aktualisasi berjalan sesuai metode pembelajaran yang ditetapkan. Selama proses berlangsung, *coach* menekankan aspek refleksi, kedisiplinan, dan penerapan nilai BerAKHLAK untuk menjamin keberhasilan aktualisasi
5. **Perwakilan Divisi *Ingest*** yang memberikan masukan teknis terkait data.
6. **Perwakilan Divisi Redaksi** yang memberikan masukan teknis terkait konten.

C.Kendala dan Strategi Menghadapi Kendala

Tabel 4.2 Daftar Kendala dan Strategi Menghadapinya

No.	Kendala	Strategi Menghadapi Kendala
1.	Keterbatasan waktu pelaksanaan aktualisasi yang bersamaan dengan tugas rutin produksi	Menyusun jadwal rinci, koordinasi dengan atasan, dan mengintegrasikan aktualisasi dengan pekerjaan harian
2.	Hambatan adaptasi dari beberapa staf terhadap penerapan pola kerja baru	Melakukan sosialisasi intensif, memberikan pelatihan singkat, menunjukkan manfaat langsung sistem, memberikan rekomendasi kepada pimpinan sehingga sistem dapat menjadi kewajiban pekerjaan.
3.	Keterbatasan penguasaan teknologi oleh beberapa staf	Memberikan pendampingan teknis, menyediakan panduan tertulis/sederhana
4.	Koordinasi lintasbagian yang tidak selalu sinkron	Membangun komunikasi dengan lintas bagian tentang manfaat
5.	Kompleksitas alur pra produksi	Mencatat dan melakukan cross-check secara berkala kepada setiap divisi terkait alur kerja yang ada serta menentukan skala prioritas isu per dua bulan

D.Analisis Dampak

Tabel 4.3 Dampak Kegiatan

No.	Kegiatan	Dampak Positif (Jika Dilakukan)	Dampak Negatif (Jika Tidak Dilakukan)
1	Mengidentifikasi kebutuhan data dan arsip dokumenter per masa persidangan	Kebutuhan data terpetakan dengan jelas sehingga database dapat disusun sesuai kebutuhan tim produksi	sData dokumenter tetap tersebar dan sulit dilacak, menyebabkan proses produksi konten tidak efisien
2	Penyusunan Draft Sistem	Tersedia rancangan sistem database yang terstruktur dan mudah dipahami	Tidak ada pedoman baku pengelolaan data, menyebabkan ketidakteraturan

			dalam penyimpanan arsip
3	Diskusi dan Koordinasi	Terjalin kolaborasi antarunit dan kesepahaman dalam penerapan sistem	Muncul tumpang tindih pekerjaan dan kurangnya sinergi antarbidang
4	Uji Coba Terbatas	Sistem dapat diuji efektivitasnya sebelum diterapkan secara menyeluruh	Potensi kesalahan sistem tidak terdeteksi sejak awal dan berisiko mengganggu implementasi
5	Evaluasi dan Monitoring	Kualitas sistem terjaga melalui pembaruan dan perbaikan berkelanjutan	Sistem database menjadi tidak relevan dan jarang digunakan karena tidak dievaluasi
6	Implementasi Berkelanjutan & Sosialisasi Final	Sistem database diterapkan secara konsisten dan dipahami seluruh tim	Sistem tidak dimanfaatkan optimal sehingga masalah ketidaktepatan waktu dan kualitas dokumenter

Tabel 4.4 Dampak Kegiatan Berdasarkan Horizon Waktu

Horizon Waktu	Dampak Positif	Dampak Negatif
Jangka Pendek	Terbentuk sistem database awal yang membantu tim dalam mengakses arsip dokumenter dengan lebih cepat dan rapi	Adaptasi awal terhadap sistem baru mungkin menimbulkan kebingungan atau resistensi dari sebagian staf.
Jangka Menengah	Proses penyusunan dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI menjadi lebih efisien, tepat waktu, dan terstandar.	Jika tidak dimonitor dan diperbarui, sistem dapat mengalami stagnasi dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan produksi.
Jangka Panjang	Terbangunnya budaya kerja berbasis data dan kolaborasi lintas unit yang mendukung transformasi digital TVR Parlemen.	Risiko hilangnya kontinuitas jika tidak ada komitmen kelembagaan dalam pemeliharaan dan pengembangan sistem database.

C. Jadwal Rencana Kegiatan

Tabel 4.5 Jadwal Rencana Kegiatan

No.	Kegiatan/Tahapan Kegiatan	Oktober				November			
		I	II	III	IV	I	II	III	IV
1.	**Mengidentifikasi kebutuhan data dan arsip dokumenter per masa persidangan**								
	Mengumpulkan informasi dari tim produksi dan arsip terkait jenis data yang dibutuhkan								
2.	**Penyusunan Draft Sistem**								
	Mendesain template Google Sheets yang mudah diisi dan terstruktur								
	Cross-check dengan mentor dan tim penulis dokumenter								
3.	**Diskusi dan Koordinasi**								
	Penjadwalan dan Presentasi sistem yang sudah dibuat								
	Mendapatkan masukan untuk perbaikan								
4.	**Uji Coba Terbatas**								
	Sosialisasi/training sistem yang sudah direvisi								
	Simulasi penggunaan sistem								
5.	**Evaluasi dan Monitoring**								
	Monitoring efektivitas penerapan sistem								
	Melakukan perbaikan sistem								
6.	**Implementasi Berkelanjutan & Sosialisasi Final**								
	Menjadwalkan rapat dan sosialisasi final								
	Pengisian Berkala sesuai agenda yang terjadwal								

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Isu prioritas yang diangkat dalam aktualisasi ini adalah *Ketiadaan Basis Data per Masa Persidangan yang Menghambat Proses Penyusunan Dokumenter Kaleidoskop dan Info Kinerja DPR RI.*

Permasalahan ini memiliki dampak besar terhadap efisiensi kerja, akurasi informasi, serta kualitas tayangan dokumenter di TVR Parlemen. Berdasarkan nilai-nilai **BerAKHLAK**, pelaksanaan aktualisasi telah menunjukkan penerapan sikap dan perilaku ASN yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, adaptif, kolaboratif, dan loyal. ASN berorientasi pelayanan karena menghadirkan sistem kerja berbasis data yang mempercepat layanan informasi publik. Nilai akuntabel dan kompeten tercermin melalui upaya membangun database yang transparan, dapat dipertanggungjawabkan, dan meningkatkan literasi digital dalam pengelolaan data dokumenter. Selain itu, kolaborasi lintas divisi yang terjalin menunjukkan keharmonisan dan adaptivitas ASN dalam menghadapi perubahan sistem kerja digital serta loyalitas terhadap peningkatan kinerja lembaga.

Dari perspektif **SMART ASN**, implementasi sistem database menggunakan *Google Sheets* mencerminkan lima karakter utama ASN modern, yaitu literasi digital, kecepatan beradaptasi terhadap transformasi kerja, kemampuan berkolaborasi lintas unit, efisiensi waktu dan sumber daya, serta mendorong budaya kerja berbasis data.

Hasil aktualisasi ini diharapkan dapat menunjukkan bahwa keberadaan database per masa persidangan secara nyata meningkatkan efektivitas kerja, mempercepat proses produksi, mengurangi risiko kesalahan informasi, dan memperkuat citra TVR Parlemen sebagai media parlemen yang modern, profesional, serta terpercaya.

B. SARAN

Agar hasil aktualisasi dapat berkelanjutan, disarankan agar sistem database ini ditetapkan sebagai bagian dari SOP resmi TVR Parlemen sehingga dapat digunakan secara konsisten di setiap masa persidangan. Perlu dilakukan pelatihan berkala mengenai manajemen data dan

pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kompetensi ASN di bidang pengelolaan informasi.

Selain itu, evaluasi dan monitoring rutin perlu dilakukan untuk memastikan sistem tetap relevan, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan produksi dokumenter. Diperlukan pula koordinasi yang lebih kuat antara bagian produksi, redaksi, dan arsip guna menjamin integrasi data yang menyeluruh. Ke depan, sistem database sederhana ini dapat dikembangkan menjadi *portal arsip digital terintegrasi* yang tidak hanya mendukung proses dokumentasi internal, tetapi juga menjadi sarana publikasi berbasis data yang transparan dan modern bagi lembaga DPR RI.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 1 Tahun 2021 tentang *Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil*. (2021). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 55. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara. https://peraturan.go.id/id/peraturan-lan-no-1-tahun-2021

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang *Jabatan Fungsional*. (2023). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 77. Jakarta: Kementerian PANRB. https://peraturan.go.id/id/permenpanrb-no-1-tahun-2023

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang *Manajemen Pegawai Negeri Sipil* (sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020). (2017). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.go.id/id/pp-no-11-tahun-2017

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang *Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*. (2020). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 45. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.go.id/id/perpres-no-26-tahun-2020

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal DPR RI*. (2021). Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 879. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI. https://jdih.dpr.go.id/peraturan/persekjen-no-6-tahun-2021

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang *Keterbukaan Informasi Publik.* (2008). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.go.id/id/uu-no-14-tahun-2008

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2023 tentang *Aparatur Sipil Negara*. (2023). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.go.id/id/uu-no-20-tahun-2023

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang *Penyiaran*. (2002). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139. Jakarta: Sekretariat Negara. https://peraturan.go.id/id/uu-no-32-tahun-2002